

Pandemi Covid-19 dan Bencana Seroja: Suatu Analisis terhadap Dampak Implementasi HKUP GMIT 2020 – 2023

L. Michael Riwu Kaho¹, Yuda D. Hawu Haba²

¹Program Studi Kehutanan, Faperta, Undana, Kupang

²Fakultas Teologi-Universitas Kristen Artha Wacana

Correspondence: michaelRK24@gmail.com

Abstract

The Covid-19 pandemic has caused fear and human death while Tropical Cyclone Seroja that hit NTT resulted in the destruction of people's homes, the death of pets, and crop failures which not only caused suffering and tears but also starved the community. The question is what impact the two disasters had on Haluan Kebijakan Umum dan Pelayanan (HKUP). The purpose of this study was to investigate the impact of Covid-19 and the Seroja disaster on HKUP GMIT. The research method used is qualitative research with purposively selected respondents. The sample respondents are from the entire scope of GMIT's services as representatives of stakeholders who are directly involved in the implementation of HKUP and its derivatives. The analysis was carried out longitudinally with the triangulation verification method. Quick fingerprint results show that the majority of respondents admitted that the Covid-19 non-natural disaster and the Seroja natural disaster had caused disturbances to the input aspect in the form of a decrease in congregational income and made it difficult for the process of implementing the 2020-2023 GMIT HKUP, and even greatly disrupted coordination between the scope of GMIT services, namely the Congregation-Class-Synode. As a result, Covid-19 and the Seroja disaster threaten the achievement of the goal of strengthening I in HKUP and its derivatives, namely products that are circumvented and not just output.

Keywords: Covid-19, GMIT, HKUP, quick fingerprint, TC-Seroja

Abstrak

Pandemi Covid-19 telah mengakibatkan ketakutan dan kematian manusia sementara Siklon Tropis Seroja yang melanda NTT mengakibatkan kehancuran rumah-rumah penduduk, kematian hewan piaraan dan kegagalan panen yang tidak hanya mengakibatkan penderitaan dan air mata melainkan juga kelaparan bagi masyarakat. Pertanyaannya adalah apakah dampak kedua bencana itu terhadap Haluan dan Kebijakan Umum Pelayanan (HKUP) GMIT. Tujuan penelitian ini adalah untuk menyelidiki dampak Covid-19 dan bencana Seroja terhadap HKUP GMIT. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan responden yang dipilih secara purposif. Responden sampel tersebut dari seluruh lingkup pelayanan GMIT sebagai representasi pemangku kepentingan yang terlibat langsung dalam implementasi HKUP dan turunannya. Analisis dilakukan secara longitudinal dengan metode verifikasi secara triangulasi. Hasil sidik cepat menunjukkan, mayoritas responden mengaku bahwa bencana non-alam Covid-19 dan bencana alam Seroja telah menimbulkan gangguan terhadap aspek input berupa penurunan pendapatan jemaat dan menyulitkan proses dalam implementasi HKUP GMIT 2020-2023, bahkan sangat mengganggu koordinasi antara lingkup pelayanan GMIT, yaitu Jemaat-Klasis-Sinode. Hasilnya, Covid-19 dan bencana Seroja mengancam pencapaian tujuan penguatan I pada HKUP dan turunannya, yaitu produk yang bersifat overcome dan bukan output semata.

Kata kunci: Covid-19, GMIT, HKUP, survei cepat, TC-Seroja

PENDAHULUAN

Sidang Sinode GMIT XXXIV di Jemaat GMIT Paulus Kupang telah menetapkan Haluan Kebijaksanaan Umum Pelayanan (HKUP) 2020-2023 sebagai payung hukum Program Strategis Jangka Menengah pada lingkup Sinode (kebersamaan) sekaligus sebagai payung bagi penyusunan Pokok-pokok Program Pelayanan di lingkup Klasis dan Jemaat. Selanjutnya, berdasarkan payung program strategis yang ada pada HKUP, maka baik Badan Pembantu Pelayanan (BPP) dan Unit Pembantu Pelayanan (UPP) di lingkup Sinode menurunkan Program-program Pelayanan Tahunannya (PPT) masing-masing. Pada lingkup Klasis dan Jemaat, turunan HKUP di lingkup masing-masing (Pokok-Pokok Program Pelayanan) diturunkan juga menjadi Program Pelayanan Tahunan di masing-masing lingkup tersebut. Cara menjabarkan HKUP, dan juga Pokok-pokok Program Pelayanan dan Program Pelayanan telah diputuskan dalam Sidang Majelis Sinode GMIT di Jemaat Benyamin Oebufu, Klasis Kupang Tengah pada Februari 2020 dalam bentuk suatu Standard Operasional Procedures (SOP). Dengan begitu, diharapkan pelayanan GMIT pada semua lingkup pelayanan dapat dijalankan secara terpadu, holistik, sistematis dan strategis.

Guna memastikan HKUP dan turunannya telah diimplementasikan sebagaimana mestinya, maka pada Sidang Majelis Sinode di Jemaat GMIT Benyamin itu telah pula diputuskan tentang SOP pelaksanaan kegiatan pengendalian pelaksanaan HKUP, yakni monitoring dan evaluasi, secara berkala pada semua lingkup pelayanan GMIT. Kegiatan tersebut, sebagaimana layaknya kaidah sistem pengelolaan sistem organisasi yang bertumpu pada perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian, merupakan tekad seluruh lingkup pelayanan GMIT guna mengejar amanat Rencana Induk Pelayanan (RIP) GMIT 2011 – 2030. Jika pada periode I dan II HKUP dan turunannya diamanatkan untuk melaksanakan program pelayanan dengan tema rintisan I dan II, di mana tolok ukur pencapaian produknya bersifat output, maka pada periode 2019-2023 program HKUP telah mengarah pada tema penguatan dimana GMIT diharapkan telah mampu mentransformasikan programnya menjadi perubahan-perubahan signifikan menuju cita-cita GMIT sesuai visi dan misinya. Sidang Sinode yang akan datang, yang pada tahun 2023 di Sabu-Raijua, akan memeriksa apakah majelis pada seluruh lingkup pelayanan GMIT telah sampai pada tujuan program penguatan. Guna memastikan itu, maka aktivitas pengendalian (monev) perlu dilakukan secara berkala. Menurut jadwal monev, maka pada tahun pelayanan 2021 ini telah tiba saatnya untuk melakukan monev mid-term atau pertengahan masa pelayanan 2019-2023.

Instrumen penyusunan kerangka HKUP GMIT 2019-2023 bertumpu pada upaya untuk memastikan kelanjutan dan konsistensi pelaksanaan program pelayanan dari yang sebelumnya adalah program dengan sifat rintisan menjadi program penguatan. Variabel penting yang digunakan dalam instrumen tersebut tersusun dalam kerangka logis model perencanaan bahwa produk (*outcome*) adalah resultante dari sejumlah input yang diberikan dan proses yang dikerjakan pada konteks yang sesuai dengan kebutuhan lingkup pelayanan GMIT secara komprehensif. Model tersebut dikenal di dalam dokumen HKUP sebagai model CIPP (*context, input, processes and product*). Dengan kata lain, kemajuan pelayanan di semua lingkup (konteks) harus diukur berdasarkan produknya (*overcome*) sebagai hasil

dari masukan dan proses. Variabel-variabel inilah yang akan ditelusuri di dalam kegiatan pengendalian (monev).

Pada saat penyusunan dokumen HKUP 2019 – 2023, semua harapan tentang CIPP diletakkan pada asumsi situasi yang normal kendati berisiko. Tidak sepenuhnya dibayangkan munculnya gangguan yang cepat dan mendadak (bencana) terhadap aspek Context, Input, Processes and Product (KIPP) yang mengguncang perjalanan pelayanan sesuai amanat HKUP dan turunannya. Pada bagian analisis konteks di dalam dokumen HKUP 2019-2023 (Bab II), khususnya tentang “Relasi GMT dengan Lingkungan” terdapat peringatan, bahwa Provinsi NTT berisiko tinggi terhadap bencana angin ribut. Demikian juga ada peringatan tentang kemungkinan terjadinya bencana ekologis karena gangguan terhadap derajat keanekaragaman hayati. Sayang sekali, kedua jenis ancaman itu tidak dibayangkan berubah menjadi ancaman *real time hazard* dalam skala dan intensitas yang amat tinggi. Bencana non-alam Covid-19 yang semula hanya kasus lokal (endemi) di Provinsi Wuhan, China, secara cepat berkembang menjadi pandemi yang berskala global. Tak ada negara di dunia yang bebas Covid-19, termasuk NTT sebagai wilayah pelayanan utama GMT. Celakanya, pandemi ini sangat persisten dimana virus corona bermutasi ke dalam berbagai varian baru dengan kecepatan penyebaran dan fatalitas yang mencengangkan sampai saat riset ini berlangsung di tahun 2021.

Sebagai upaya untuk memitigasi bencana non-alam ini, maka pemerintah telah menjalankan upaya guna membatasi potensi berkumpulnya orang secara masif (*social distancing*) secara bersamaan dalam waktu yang panjang. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia¹ melalui penerbitan Surat Edaran Dirjen P2P Nomor: HK.02.02/II/753/2020 Tentang Revisi ke-3 Pedoman Kesiapsiagaan Menghadapi Infeksi Novel Corona Virus (COVID-19), memuat antara lain ketentuan tentang pembatasan sosial (*social distancing*). Salah satu dampak diberlakukannya *social distancing* terhadap GMT adalah terbatasnya aktivitas fisik di gedung gereja di mana gereja diharuskan melaksanakan peribadatan secara daring (*online*) atau peribadatan mandiri dari rumah. Survey Tim Kerja BPPPS GMT tentang dampak pandemi Covid-19 pada akhir 2020² memperlihatkan kecenderungan gangguan Covid-19 variabel input dan proses dalam pelaksanaan HKUP dan turunannya di seluruh lingkup GMT. Dampak ini terlihat pada fakta temuan penelitian yang menunjukkan bahwa pada 86% jemaat telah terjadi penurunan pendapatan jemaat yang berasal dari persembahan mingguan. Sisanya sebesar 10% jemaat (52 Jemaat) mengaku bahwa pendapatannya tetap dan hanya 4% jemaat (20 Jemaat) yang pendapatannya naik. Hal ini sejalan dengan fakta perkembangan ekonomi nasional Indonesia yang pada tahun 2020 berkontraksi sebesar 2.07% sedangkan kontraksi ekonomi Provinsi NTT sebesar 0.83%.³

Pada saat gangguan karena Covid-19 belum berakhir, maka pada awal April 2021, banyak wilayah pelayanan GMT terparap bencana hidrometeorologi berupa Siklon Tropis

¹ Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. “Surat Edaran Dirjen P2P Nomor: HK.02.02/II/753/2020 Tentang Revisi ke-3 Pedoman Kesiapsiagaan Menghadapi Infeksi Novel Corona Virus (COVID-19)”. Diakses pada Juni 24, 2020. <https://kemkes.go.id/article/view>

² Badan Pusat Statistik Propinsi NTT. “Ekonomi NTT Triwulan IV-2020 Mengalami Kontraksi Sebesar 2,27 Persen”. Diakses pada Juni 24, 2020. <https://ntt.bps.go.id/pressrelease/2021/02/05/1014/>

³ Majelis Sinode GMT, *Haluan Kebijaksanaan Umum Pelayanan Sinode GMT Periode 2020 – 2023*. Kupang, Sinode GMT, 2014

Seroja dan multi dampak sebagai ikutannya seperti banjir, longsor dan erosi yang memakan korban harta dan jiwa. Bencana ini secara samar telah diingatkan pada bagian analisis sisi konteks dokumen HKUP 2020-2023⁴ namun analisis tersebut belum berhasil mengaitkannya dengan ancaman nyata (*real time hazard*) yang terjadi dalam skala sinoptik (skala global). Siklon Tropis Seroja menerjang wilayah NTT, dan pengaruhnya dirasakan juga sampai ke beberapa wilayah lain di Indonesia, dengan peringatan hanya berjarak 1 minggu dari saat terjadinya.

Pendataan Tim Penanggulangan Bencana TC Seroja oleh MS GMIT⁵ menemukan fakta bahwa dampak TC Seroja yang dirasakan secara langsung oleh entitas wilayah pelayanan GMIT di 33 dari 52 Klasis. Korban meninggal dunia berjumlah 27 orang, korban hilang berjumlah 3 orang, rumah warga terdampak rusak ringan sedang dan berat sebanyak 21.479, gedung Gereja terdampak rusak ringan, sedang dan berat berjumlah 311 unit, pastori terdampak rusak ringan, sedang dan berat berjumlah 94 unit, gedung sekolah terdampak rusak ringan, sedang dan berat berjumlah 29 unit, lahan pertanian berupa sawah sebanyak 1757 bidang, kebun warga sebanyak 1.201 bidang, kerusakan mata pencaharian nelayan serta ternak hilang maupun mati sebanyak 751 ekor dan mata pencaharian lain yang juga terdampak sebanyak 381 meliputi, kios, bengkel dll. Gambaran dan data tentang kondisi kerusakan akibat bencana badai siklon seroja diatas telah menyita waktu, tenaga material serta biaya sejak memasuki fase tanggap darurat hingga fase “rekonstruksi dan rehabilitasi” yang bisa saja memakan waktu satu sampai dua tahun mendatang (kegiatan fase rekonstruksi dan rehabilitasi bisa berlansung sampai akhir periode pelayanan 2020-2023).

Bertolak dari realitas dua bencana yang telah digambarkan di atas, yakni pandemi Covid-19 yang persisten & bencana Badai Siklon Seroja yang dalam penanganan masa rekonstruksi dan rehabilitasinya dipastikan akan memakan waktu yang lama, maka patut diduga bahwa pelaksanaan HKUP 2020-2023 tidak dapat berjalan secara maksimal pada semua variabel HKUP GMIT 2019-2023 yang meliputi konteks, input, proses dan produk (KIPP). Dengan demikian, pelaksanaan kegiatan monev HKUP GMIT dan turunannya harus mempertimbangkan secara serius dampak dari dua bencana tersebut ke dalam implementasi HKUP GMIT di seluruh lingkup GMIT. Guna menjawab permasalahan ini, Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Sinode (BPPPPS) melalui Tim Kerja Perencanaan menyelenggarakan Survei Cepat (*rapid survey*) dengan tujuan mendapatkan respon dari badan pelayanan di tiga lingkup (Jemaat, Klasis dan Sinode) guna memantau, mendeteksi dan mengevaluasi berbagai faktor yang mungkin menjadi kendala bagi implementasi HKUP periode 2020-2023, kemungkinan gangguan yang ditimbulkan oleh bencana berskala masif tersebut. Asumsi sidik cepat ini adalah jika variabel input dan proses terkendala oleh gangguan, maka hal ini berpotensi mereduksi produk (*overcome*) pada semua konteks pelayanan. Jika asumsi ini terbukti benar, maka hipotesisnya atau

⁴ Majenis Sinode GMIT. Haluan Kebijaksanaan Umum Pelayanan Sinode GMIT Periode 2020 – 2023, Kupang: Sinode GMIT 2019.

⁵ Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Sinode GMIT, “*Kajian Dampak Bencana Siklon Tropis Seroja Terhadap Infrastruktur di Lingkup GMIT*” Sinode GMIT: Kupang, 2020.

kemungkinan hipotesisnya adalah diperlukan sejumlah pengubahsuaian (*adjust*) terhadap dokumen HKUP dan turunannya.

METODE

Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif guna mendeskripsikan respons pelaku HKUP dari semua lingkup pelayanan GMIT di Jemaat, Klasis dan Sinode. Secara khusus, metode survei dipilih untuk digunakan dalam menjalankan riset ini karena yang akan dideskripsikan adalah sampel dan bukan seluruh populasi GMIT. Jika populasi GMIT adalah totalitas seluruh jemaat dan presbiter, maka sampel adalah mereka yang dianggap terlibat secara langsung dalam memahami HKUP, menurunkannya sebagai Pokok-pokok Program, mengelaborasi ke dalam Program Pelayanan Tahunan, melaksanakan program dan melakukan tindakan pengendalian (*move*).

Variabel penelitian ini dikelompokkan ke dalam 3 bagian besar, yaitu:

1. Keberadaan HKUP dan turunannya di semua lingkup pelayanan;
2. Gangguan yang terjadi dalam CIPP, terutama yang bersifat *force majeure*, yaitu pandemi Covid-19 dan TC Seroja;
3. Keputusan terhadap implementasi HKUP setelah mengalami gangguan pada aspek CIPP-nya.

Dengan merujuk kepada prinsip umum metode sampling purposive, maka teknik sampling yang digunakan bukanlah teknik *probability sampling* yang bersifat kuantitatif itu melainkan metode *non-probability sampling*, yakni teknik *purposive sampling* atau sampling bertujuan (Sugiyarto, 2015). Berdasarkan ketentuan dalam metode sampling purposive, maka jumlah responden tidak dipilih secara acak (kuantitatif) melainkan dikategorikan terlebih dahulu ke dalam beberapa cluster sesuai kebutuhan riset, yakni: Majelis Sinode Harian & Anggota Majelis Sinode Non Pendeta, BPPS, UPPMS, Ketua Majelis Klasis, Ketua Majelis Klasis, Ketua Majelis Jemaat, Pendeta, Penatua, Diaken, Pengajar, Anggota Sidi.

Selanjutnya, guna memahami situasi masing-masing responden terhadap dampak dua bencana masif yang diduga mengganggu prinsip CIPP dalam HKUP dari total 10 cluster di atas dilakukan lagi pemilahan cluster. Pertama, cluster sasaran yang ada pada teritori jemaat dan klasis. Kedua, cluster jemaat dan klasis dipilah lagi ke dalam cluster lanjutan, yaitu: 1) tidak terdampak; 2) terdampak ringan; 3) terdampak sedang dan 4) terdampak berat. Secara khusus cluster terdampak ini hanyalah merujuk kepada dampak bencana TC Seroja sedangkan untuk dampak Covid-19 semua daerah diasumsikan seragam karena pola penularan selalu bergerak dalam pola teracak dimana semua daerah punya potensi yang sama untuk terpapar Covid-19.

Guna mendapatkan pendapat dari para responden, maka instrumentasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggabungkan antara penggunaan teknik kuantitatif, yaitu daftar pertanyaan dan wawancara mendalam, yang khas sebagai salah satu instrumen penelitian kualitatif. Wawancara terutama dilakukan terhadap responden yang berasal dari Kantor Majelis Sinode. Melalui penggunaan instrumen daftar pertanyaan dan wawancara,

maka data primer dalam riset ini berasal dari observasi langsung. Sementara itu, sebagai data pembandingan, maka riset ini juga menggunakan beberapa sumber data sekunder, yaitu data hasil riset MS GMIT, melalui BPPPPS Tim Tanggap Bencana MS GMIT, terhadap dampak Covid-19 dan TC Seroja. Data-data yang berasal dari hasil riset terdahulu ini adalah sumber data sekunder dalam riset cepat money ini. Data sekunder juga dikumpulkan dari sumber lain, yaitu data dari Satgas Covid-19 Pemda NTT dan BPBD Provinsi NTT untuk dampak TC Seroja. Kendati menggunakan instrumen bantu daftar pertanyaan tetapi kejenuhan jawaban akan menjadi pertimbangan utama dalam membaca hasil pendataan sebagaimana ketentuan di dalam metode kualitatif yang menggunakan metode *sampling purposive*.⁶

Analisis data yang digunakan dalam sidik cepat ini adalah metode analisis *longitudinal*, yakni metode untuk melihat kecenderungan pendapat responden terhadap objek penelitian yang berlangsung dari waktu ke waktu dalam jangka waktu yang panjang (Sugiyarto, 2015). Kinerja pencapaian HKUP dan faktor CIPP-nya yang telah dikerjakan sejak ditetapkan pada tahun 2019 akan mudah dianalisis dengan metode ini. Gangguan terhadap CIPP dalam HKUP baik karena alasan kinerja rutin dan bencana pandemi Covid-19 dan TC Seroja berlangsung dalam kurun waktu berurutan. Hal ini telah memenuhi kaidah analisis *longitudinal*.

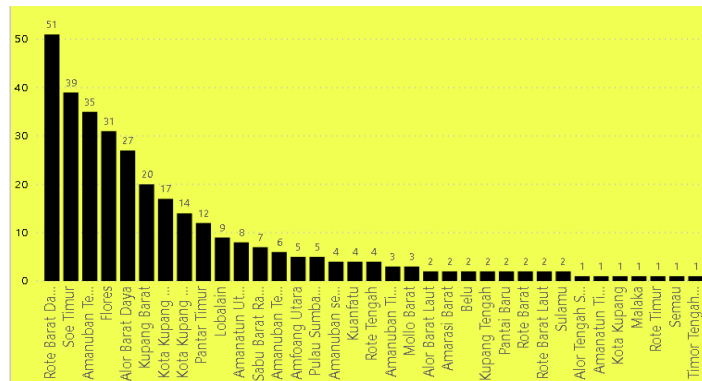
Dalam analisis kecenderungan, maka persentase jawaban yang lebih besar adalah kecenderungan yang terkuat. Namun demikian, sebagai mitigasi kemungkinan tipisnya perbedaan persentasi (kuantitatif), maka analisis juga menggunakan pendekatan metode triangulasi, yaitu jawaban responden atas daftar pertanyaan adalah salah satu titik sudutnya tetapi jawaban ini akan dibandingkan dengan data lain yang berasal dari dua sudut lainnya, yakni pendapat responden yang berasal dari Kantor Sinode dengan asumsi bahwa anggota MSH memiliki pemahaman yang komprehensif terhadap wilayah pelayanan GMIT terutama dalam kaitannya dengan salah satu tugas anggota MSH sebagai koordinator teritori. Secara metodologis, maka jawaban dari anggota MSH telah mensubstitusi absensnya beberapa klasis. Titik triangulasi lainnya adalah data yang berasal dari sumber-sumber sekunder lain seperti Satgas Covid-19 Provinsi NTT dan Badan Penanggulangan Bencana Provinsi NTT.

PEMBAHASAN

Profil Responden

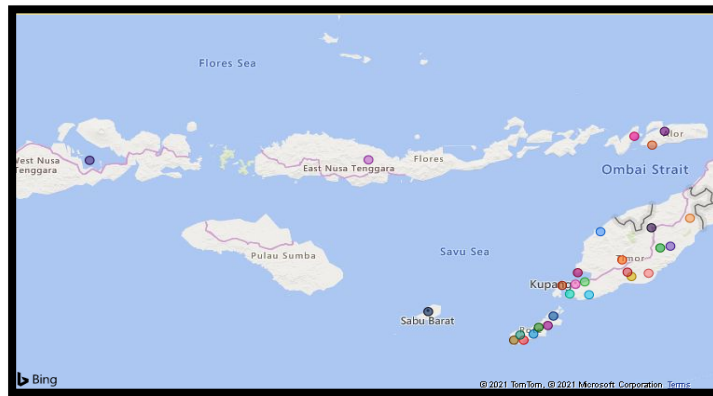
Pada bagian ini, akan disampaikan profil responden yang aktif berpartisipasi di dalam sidik cepat terkait money HKUP ini guna memastikan bahwa tujuan purposif terhadap sampling telah tercapai. Data memperlihatkan, bahwa total 52 klasis, dan jemaat yang ada di dalam lingkup klasis dimaksud, maka tingkat partisipasinya adalah 35 klasis berpartisipasi (67.31%) sementara 17 klasis tidak berpartisipasi (32.69%). Gambar infografis berikut ini menunjukkan distribusi responden yang berpartisipasi berdasarkan letak klasisnya. Beberapa klasis (sekitar 20 klasis) berpartisipasi dengan intensitas tinggi sementara 15 klasis berpartisipasi dalam intensitas yang rendah dimana hanya 1-2 exemplar lembar jawaban yang masuk ke tangan peneliti (BP4S).

⁶ Sugiyarto, *Dasar-Dasar Statistika Farmasi*, (Yogyakarta, 2015)



Gambar 1. Infografis Distribusi Klasis yang ikut serta di dalam Sidik Cepat

Selanjutnya, Gambar 5 adalah peta yang memperlihatkan spatial sebaran responden yang telah berpartisipasi.



Gambar 2. Peta Distribusi ruang teritori Klasis-Klasis yang berpartisipasi

Data profiling responden juga menunjukkan, bahwa terdapat 17 klasis yang tidak berpartisipasi dengan alasan gangguan komunikasi dan alasan lainnya, yaitu:

1. Teritori Kuda-Semau 6 Klasis: Amabi Oefeto Timur, Amarasi Timur, Amfoang Selatan, Fatuleu Timur, Fatuleu Barat & Kupang Timur;
2. Teritori TTS 5 Klasis SoE, Amanatun Selatan, Amanuban Timur Selatan, Mollo Utara, Moll Timur.
3. Tribuana 5 Klasis: Alor Tenga Utara, Alor Timur, Alor Timur Laut, Pantar Barat, Telukh Kabola
4. Rote Sabu: Sabu Timur.

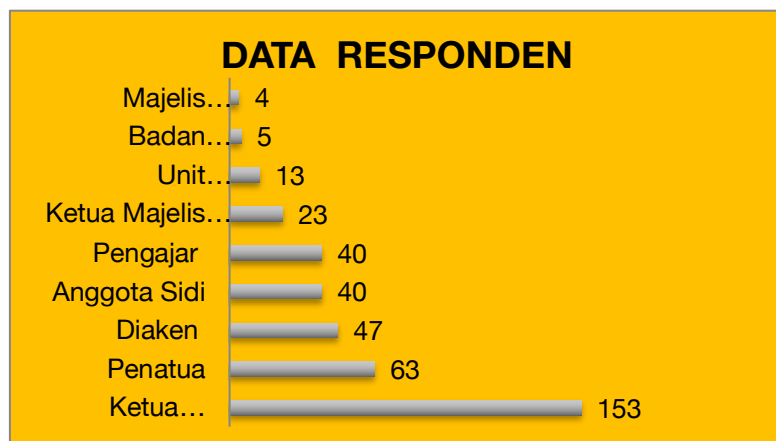
Melihat data di atas, maka dapat dikatakan bahwa pada *layer* 1, yaitu besarnya partisipasi dan distribusi teritori klasis, dan jemaat yang tersarang (*nested*) di dalam Klasis, maka tujuan purposif telah tercapai. Mayoritas klasis telah ikut berpartisipasi. Selanjutnya pada *layer* ke dua, yakni purposif atas dasar berat ringannya dampak TC Seroja, datanya disajikan di dalam **Tabel 2**. Data pada **Tabel 2**, memperlihatkan, bahwa tujuan purposif dengan alasan derajat terdampak TC Seroja telah terpenuhi. Sebesar 72% Klasis yang terdampak berat telah berpartisipasi. Selanjutnya, 50% klasis pada kategori terdampak sedang telah berpartisipasi dan akhirnya 80% klasis pada teritori yang terdampak ringan ikut

berpartisipasi. Rerata yang berpartisipasi sebesar 67.3% yang juga adalah angka rerata total tingkat partisipasi seperti yang telah dikemukakan pada bagian awal profil responden. Perlu diingatkan, bahwa di bagian metode telah dijelaskan terkait dampak Covid-19, tidak dilakukan pemilahan cluster karena menurut kaidah ilmu epidemiologi, seluruh wilayah pelayanan GMIT terkategori sangat rentan mengalami penularan. Data tentang pandemi Covid-19 di NTT telah dipaparkan pada bagian pendahuluan laporan ini.

Profil responden selanjutnya adalah pelaku yang dianggap sebagai pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang terkait langsung dengan implementasi HKUP dan turunannya di seluruh lingkup pekayaan GMIT. Angka partisipan responden berdasarkan kelompok sasaran dimaksud ditunjukkan dalam infografis (Gambar 2).

Tabel 1. Distribusi tingkat partisipasi responden per Klasis berdasarkan Klaster Dampak TC Seroja (Berat, Sedang dan Ringan)

KATEGORI	NO	KLASIS	KLASIS YG BERKONTRIBUSI	KETERANGAN
BERAT	1	Alor Tengah Selatan	MENGISI SURVEI	25 klasis tergolong kategori berat .18 Klasis mengisi survei (72 %) 7 klasis tidak mengisi survei (28 %)
	2	Alor Tengah Utara	TIDAK MENGISI SURVEI	
	3	Pantar Timur	MENGISI SURVEI	
	4	Pantar Barat	TIDAK MENGISI SURVEI	
	5	Sabu Timur	TIDAK MENGISI SURVEI	
	6	Sabu Barat	MENGISI SURVEI	
	7	Kota Kupang	MENGISI SURVEI	
	8	Kota Kupang Timur	MENGISI SURVEI	
	9	Kota Kupang Barat	MENGISI SURVEI	
	10	Kupang Timur	TIDAK MENGISI SURVEI	
	11	Kupang Barat	MENGISI SURVEI	
	12	Amarasi Barat	MENGISI SURVEI	
	13	kupang Tengah	MENGISI SURVEI	
	14	Malaka	MENGISI SURVEI	
	15	Rote Barat	MENGISI SURVEI	
	16	Amanuban Selatan	MENGISI SURVEI	
	17	Fatuleu Timur	TIDAK MENGISI SURVEI	
	18	Rote Barat Daya	MENGISI SURVEI	
	19	semau	MENGISI SURVEI	
	20	Alor Timur laut	TIDAK MENGISI SURVEI	
	21	Rote Timur	MENGISI SURVEI	
	22	Rote Tengah	MENGISI SURVEI	
	23	Iobalain	MENGISI SURVEI	
	24	Alor Timur laut	TIDAK MENGISI SURVEI	
	25	Rote Barat Laut	MENGISI SURVEI	
SEDANG	1	Amfoang Utara	MENGISI SURVEI	8 Klasis tergolong Kategori Sedang .4 Klasis mengisi survei (50 % & 4 Klasis tidak mengisi survei (50 %)
	2	Amfoang Selatan	TIDAK MENGISI SURVEI	
	3	Amabi Oefeto Timur	TIDAK MENGISI SURVEI	
	4	Amarasi Timur	TIDAK MENGISI SURVEI	
	5	Pantai Baru	MENGISI SURVEI	
	6	Fatuleu Barat	TIDAK MENGISI SURVEI	
	7	Flores	MENGISI SURVEI	
	8	sulamu	MENGISI SURVEI	
RINGAN	1	Mollo Barat	MENGISI SURVEI	5 klasis tergolong Kategori Ringan, 4 Klasis mengisi survei (80 %), 1 Klasis tidak mengisi survei (20 %)
	2	Mollo Timur	TIDAK MENGISI SURVEI	
	3	Amanuban Timur	MENGISI SURVEI	
	4	Kuanfatu	MENGISI SURVEI	
	5	Alor Barat laut	MENGISI SURVEI	



Gambar 3. Infografis distribusi responden berdasarkan kelompok sasaran

Infografis pada Gambar 3 di atas memperlihatkan data, bahwa seluruh kelompok sasaran dalam sidik cepat ini telah ikut berpartisipasi, yaitu KMJ, Presbiter di Jemaat (Penatua, Diaken dan Pengajar), Anggota Sidi di Jemaat, KMK serta kelompok sasaran yang berasal dari Kantor Sinode, yaitu UPP-MS, BBPS dan Anggota MSH. Perlu dijelaskan bahwa pada kelompok sasaran MSH, kendati yang mengisi dan mengembalikan lembar daftar pertanyaan telah mencapai 80 %, tetapi terhadap mereka telah dilakukan pendekatan lanjutan lainnya penggunaan instrumen wawancara dalam pola *Focus Group Discussion* (FGD). Dengan demikian, kelompok sasaran ini telah melakukan perannya sebagai verifikator sesuai desain metode.

Singkat kata, berdasarkan profil responden, pada berbagai layer dan kategori, yang telah dikemukakan dapat disimpulkan bahwa riset ini telah memberikan hasil yang dapat diterima secara metodologis karena besarnya angka kecenderungan berpartisipasi. Dengan demikian, pembahasan dan kesimpulannya harus dianggap cukup valid dan dapat dipercaya. Namun demikian perlu ditegaskan bahwa pengambilan keputusan akhir atas hasil sidik cepat ini bukan merupakan wilayah kerja dan kewenangan tim peneliti melainkan ada pada forum Sidang Majelis Sinode.

Kehadiran Dokumen HKUP di Lingkup Pelayanan dan Upaya Menjadikannya sebagai Panduan Pelayanan

Sebagaimana yang telah dikemukakan pada bagian metode, maka lima buah pertanyaan awal dalam daftar pertanyaan (butir 1-5) adalah tentang eksistensi HKUP di semua lingkup pelayanan dan apakah dokumen tersebut telah diturunkan sebagai payung program pelayanan di lingkup masing-masing. Perlu diingatkan bahwa bagi kelompok sasaran di lingkup sinode tidak memerlukan upaya khusus untuk menterjemahkannya menjadi bentuk rencana di bawahnya karena HKUP memang dirancang bagi pemangku kepentingan I, yaitu mereka yang berada pada lingkup sinode. Upaya lebih ekstra justru harus dilakukan di tingkat klasis dan jemaat karena HKUP terlebih dahulu harus diterjemahkan menjadi payung penyusunan Pokok-pokok Program Pelayanan periodik (4 tahun) kemudian menurunkannya lagi sebagai Program Pelayan Tahunan.

Hasil penelitian memberikan informasi sebagai berikut:

5. Sebesar 78.84% responden mengaku bahwa dokumen HKUP telah berada ada lingkup pelayanan mereka. Kecenderungan ini amat baik namun perlu diperhatikan bahwa setelah hampir dua tahun sejak diputuskan di Sidang Sinode Oktober 2019 di Jemaat GMIT Paulus, ternyata masih ada 15.65% responden yang mengaku bahwa dokumen tersebut tidak ada di lingkup mereka dan sekitar 5.51%, bahkan tidak menahu tentang keberadaan dokumen ini dimana, dan alasan sekitar 20% responden berpendapat demikian perlu ditelusuri lebih lanjut. Implementasi monev yang lengkap pada akhir tahun 2021 dan awal 2020, sesuai keputusan Benyamin Oebufu, perlu memeriksa kembali data ini. Monitoring oleh MS diperlukan juga untuk hal tersebut.
6. Di dalam kelompok responden yang mengaku bahwa dokumen HKUP ada di tangan mereka, maka 82.32% responden mengaku bahwa dokumen HKUP 2019-2023 telah digunakan sebagai panduan dalam penyusunan Pokok-pokok Program

dan turunannya. Sisanya, sebesar 17.77% mengungkapkan bahwa program pelayanan mereka belum mengacu pada dokumen HKUP. Untuk tujuan sidik cepat jawaban mayoritas tersebut sudah memadai sebagai pintu bagi pertanyaan tentang gangguan terhadap implementasi HKUP dan turunannya. Namun demikian, upaya mencari bukti disarankan untuk dilakukan pada saat monev lengkap dan atau monitoring berkala oleh MS. Demikian pula data bahwa masih ada 17.77% yang menjalankan pelayanan tanpa mengacu pada dokumen HKUP menarik untuk dicermati. Di lokalitas mana mereka itu berada dan apa alasannya adalah penting untuk ditelusuri lebih lanjut.

7. Berdasarkan Keputusan Sidang MS di Jemaat GMIT Benyamin Februari 2020, pelaksanaan HKUP harus diikuti dengan tindakan monev sesuai format yang diputuskan saat itu. Untuk point ini, ternyata hanya sekitar 53.33% responden yang mengaku telah melakukan monev berdasarkan SOP sesuai keputusan Sidang MS di Oebufu. Data ini memberikan informasi yang penting bahwa ada kemungkinan pelaksanaan HKUP dan turunannya sulit memenuhi aspek-aspek CIPP yang berada di dalamnya. Peluang itu ada karena pelaksanaan program di 50% lingkup tidak dikendalikan (monev) seperti yang seharusnya. Mempertanggungjawabkan implementasi HKUP dan turunannya menjadi agak sulit jika hal ini tidak teratasi. Saat monev lengkap, hal ini mungkin lebih bisa ditelusuri dengan melihat bukti-bukti dan alasan yang bisa diungkapkan lebih jauh.
8. Salah satu alasan yang dapat ditelusuri terhadap data bahwa masih ada lingkup GMIT yang belum melaksanakan program berpedoman terhadap dokumen HKUP, bahkan sangat besar presentasi lingkup yang belum melaksanakan monev program pelayanan dalam format yang diputuskan bersama mungkin terselip di dalam data berikut ini. Sebesar 47.83% responden mengaku kesulitan dalam memahami isi dokumen HKUP sementara 52.17% mengaku memahaminya. Jika dibulatkan, maka hal ini menggambarkan presentasi yang mirip dengan data pada butir 3 di atas. Ada kemungkinan belum dilaksanakannya monev yang sesuai keputusan MS berasal dari adanya kesulitan memahami dokumen HKUP dan SOP pelaksanaannya. Data ini sekaligus memberi indikasi bahwa perlu didalami model program pelayanan seperti apa yang tadinya diakui telah disusun dengan berpandu kepada HKUP. Jika memahami HKUP dan SOP-nya masih terkendala, maka ada kemungkinan Program Pelayanan yang disusun belum sesuai benar dengan maksud dan tujuan HKUP.
9. Penelusuran sederhana dalam sidik cepat ini terhadap kesulitan yang terjadi dalam implementasi HKUP dan turunannya dapat dilihat pada data berikut ini:
 - Sebesar 55.94% responden mengaku bahwa faktor input adalah kendala dalam menjalankan HKUP dan turunannya di lingkup masing-masing. Sementara 44.06% mengaku input bukan kendala. Jika input adalah variabel yang menunjukan kebutuhan alokasi sumberdaya terhadap pencapaian produk HKUP maka secara *longitudinal*, aspek input harus dianggap berpotensi besar mengkendala implementasi HKUP dan turunannya. Hal ini juga sekaligus menjadi dasar bagi pemahaman tentang apakah Covid-19 dan TC Seroja mengkendala implementasi HKUP.

- Sementara itu, angka presentasi yang lebih besar, yaitu 62.9% responden mengaku bahwa aspek proses ada proses yang menghambat implementasi HKUP dan turunannya. Jika proses adalah variabel yang menunjukkan bagaimana suatu program strategis dapat tersampaikan dengan baik dan bertransformasi menjadi pemahaman yang sama pada seluruh lingkup, maka data di atas telah menunjukkan bahwa proses jauh lebih berpotensi mengendalikan implementasi HKUP dan turunannya. Karena dalam daftar pertanyaan telah diikut sertakan “koordinasi antar lingkup” sebagai contoh variabel proses yang dapat menjadi kendala implementasi HKUP dan turunannya, maka secara kualitatif faktor koordinasi itu harus dianggap sebagai faktor yang kuat pengaruhnya. Jika 60% lebih responden mengaku bahwa koordinasi antara lingkup adalah kendala, maka kinerja koordinasi Sinode-Klasis-Jemaat mungkin harus lebih ditingkatkan jika ingin agar HKUP periode 2019-2023 sukses diimplementasikan.
- Sebagai konsekuensi dari kendala-kendala di atas, maka terhadap pertanyaan “apakah produk dari HKUP dan turunannya telah mencapai derajat *overcome*, yang adalah target penanda tercapainya tahap penguatan I menurut dokumen RIP 2011-2023, ataukah hanya berupa *output*, yang adalah ciri pencapaian program rintisan yang telah lewat”. Data hasil sidik cepat menunjukkan bahwa hanya 48.41% responden yang menjawab produk telah mencapai derajat *overcome*. Sisanya adalah 34.04% menjawab tidak dan 17.58% menjawab tidak tahu. Jika dua jawaban yang mengandung frasa kata “tidak” digabungkan maka jumlahnya adalah sebesar 51.62%. Secara kualitatif harus dikatakan bahwa ada keraguan yang cukup besar terhadap tercapainya tujuan HKUP 2019-2023 berupa pencapaian produk dari program yang bersifat penguatan. Hal ini tidak mengherankan karena hal ini sejalan dengan pengakuan responden bahwa selama dua tahun ini aspek input dan proses telah dan mungkin akan menjadi kendala berat bagi pencapaian tujuan HKUP dan turunannya. Seandainya saja seluruh pengakuan responden diwajibkan harus disertakan dengan bukti (*evident based*), maka keraguan itu bisa jadi akan lebih besar. Monev lengkap mungkin bisa mendeteksi itu dan sejumlah tindakan strategis perlu diambil agar pencapaian HKUP tidak terlalu jauh melenceng dari apa yang telah ditetapkan.

Gangguan terhadap Implementasi HKUP dan Pokok-Pokok Program Pelayanan Akibat Covid-19 dan TC Seroja

Sampai pada pembahasan terhadap data sidik cepat ini di bagian 2 di atas, telah terdeteksi beberapa hal. Pertama, kita patut bersyukur bahwa mayoritas responden mengaku bahwa HKUP dan turunannya telah diimplementasikan di semua lingkup. Namun bersamaan dengan itu kita juga bertemu dengan fakta kedua, bahwa GMIT juga patut mewaspadaai sejumlah kekhawatiran tentang kemungkinan pencapaian HKUP dan turunannya yang tidak bisa maksimal mencapai produk sesuai perintah HKUP. Aspek-aspek input dan proses telah teridentifikasi dan berpotensi sebagai kendala.

Dua bencana besar yang terjadi selama periode HKUP kali ini telah secara signifikan hadir dan berposisi sebagai aktor di balik aspek input dan proses yang mungkin mengganggu pencapaian HKUP dan turunannya. Kedua bencana itu adalah pandemi Covid-19 yang terjadi sejak akhir 2019, bersamaan dengan awal implementasi HKUP 2019-2020 dan badai

Siklon Tropis Seroja yang meluluhlantakkan sarana dan prasarana di sebagian besar wilayah utama pelayanan GMT. Ketika HKUP dirancang dan dibahas, kedua bencana ini secara langsung tidak disebut sebagai faktor pengancam tetapi jika diperhatikan benar, maka pada Bab II dokumen HKUP 2019-2020 telah dimasukkan risiko akibat relasi GMT dan lingkungan. Pada bagian itu telah dilakukan analisis konteks dimana secara langsung telah dibahas potensi bencana ekologis akibat perubahan iklim. Angin ribut adalah salah satu unsur bencana yang disebut tetapi TC Seroja datang tiba-tiba dalam skala sinoptik, yaitu fenomena iklim berskala global dimana akajiangnya dilakukan pada profil angin bertekanan 925 millibar (mb) yang bebas dari pengaruh topografi.⁷ Referensi global tentang kejadian itupun mengaku bahwa TC Seroja tidak terdeteksi sama sekali. Risiko pandemi Covid-19, sama sekali tidak terdeteksi secara terperinci. Namun demikian, jika diselidiki secara mendalam, maka pada analisis konteks di Bab II itu telah diberi peringatan bahwa ada ancaman bahaya karena penurunan keanekaragaman hayati karena kerakusan manusia. Corona Sars Cov-2 adalah bakteri yang berenang pada hewan kelelawar dan kerakusan manusia yang mengkonsumsi hewan liar itu ternyata berujung pada malapetaka berskala global. Negara paling maju sekalipun menderita akibat Covid-19 yang ternyata persisten hingga hari ini dengan segala dampak fisik, sosial, ekonomi dan budayanya.

Bagaimana entitas GMT, yang diwakili oleh para responden dalam sidik cepat ini, melihat kedua bencana ini dan kaitannya dengan implementasi HKUP serta turunannya. Berikut adalah data yang diperoleh dalam sidik cepat ini serta informasi yang terkandung di dalamnya.

1. Sebesar 86.38% responden mengaku bahwa bencana non-alam pandemi Covid-19 berpengaruh terhadap input dan proses dalam implementasi HKUP dan turunannya; Sementara itu, sebesar 70.72% responden mengaku bahwa TC Seroja berpengaruh terhadap derajat input dan proses dalam implementasi HKUP dan turunannya. Kedua angka ini sangat mutlak lebih besar dibandingkan dengan yang mengatakan tidak. Hal ini mengindikasikan bahwa dua bencana ini sungguh signifikan mengancam pencapaian implementasi HKUP dan turunannya. Jika diperhatikan, maka angka kekuatiran terhadap pandemi Covid-19 lebih besar ketimbang dampak TC Seroja. Mungkin ini adalah gambaran persepsi responden bahwa pandemi Covid-19 bersifat lebih persisten dan sangat berpengaruh bukan saja kepada input tetapi juga dalam proses nyata dalam berjemaat. Kebijakan PPKM oleh pemerintah berdampak langsung terhadap persekutuan dan peribadatan secara fisik di gedung gereja. Pembatasan juga berpengaruh terhadap ekonomi jemaat dan pada akhirnya mereduksi alokasi pembiayaan program-program pelayanan. Sementara itu TC Seroja mungkin dilihat lebih bersifat sementara. Hal ini dapat dibandingkan dengan data dan informasi pada butir 2 di bawah ini.
2. Jika terhadap risiko pandemi Covid-19 tidak dilakukan peng-klastoran dampak, dengan alasan yang telah diuraikan di awal, maka data sidik cepat menunjukan

⁷ Prasetyo, S, W. Kurniawan, I.R. Rumahorbo, "Synoptic and Mesoscale Analysis Of Extreme Rainfall Event In Cilacap Meteorological Station", dalam *Jurnal Ilmu dan Inovasi Fisika*, Vol. 05, No. 02 (2021) 121 – 131.

bahwa 2.31% responden yang berpendapat bahwa mereka tidak mengalami dampak apa-apa akibat covid dan TCS. Sebesar 48.41% mengaku terdampak ringan, 44.64% terdampak berat dan sisanya sebesar 4.64% responden mengaku terdampak sangat berat. Bisa ditafsirkan bahwa lebih rendahnya persentasi kekuatiran terhadap dampak TC Seroja (lihat butir 2 di atas) disebabkan tidak meratanya dampak yang timbul karena TC Seroja. Seandainya terhadap responden disajikan juga perspektif penanganan dampak TC Seroja yang bisa berkepanjangan, mungkin persentasi kekuatiran terhadap dampak TC Seroja akan lebih besar. Gedung-gedung gereja yang hancur dan perlu diperbaiki masih akan sangat lama proses rehab-rekonnya. Belum lagi ancaman yang datang dari berulangnya siklon sejenis di NTT. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika melalui siaran persnya pada tanggal 26 Agustus 2021 (BMKG, 2021) telah memberi peringatan tentang kemungkinan berulangnya badai La Nina di musim penghujan 2021-2022. Perlu diingat bahwa badai La Nina adalah bibit munculnya siklon tropika sejenis TC Seroja. Tidak ada yang bisa memastikan bahwa pada gilirannya nanti yang tidak terdampak saat ini tidak berubah menjadi terdampak berat pada waktunya nanti. Perhatikan pula bahwa peringatan BMKG tersebut merujuk pada tahun-tahun pelaksanaan HKUP periode ini.

3. Akibat responden dalam persentase besar mengakui bahwa Pandemi Covid-19 dan TC Seroja berpengaruh terhadap aspek input dan proses dalam implementasi HKUP dan turunannya, maka sebesar 77.39% responden memperkirakan bahwa covid dan TCS akan mempengaruhi produk atau pencapaian HKUP. Produk HKUP dengan tema penguatan I, kemungkinan besar tidak akan tercapai dalam situasi saat ini.
4. Sebagai konsekuensi logis dari potensi terganggunya input, proses dan produk HKUP turunannya pada periode pelayanan 2020-2023, maka sebesar 62.03% responden mengusulkan dilakukannya pengubahsuaian (*adjust*) terhadap HKUP 2019 dan turunannya. Angka ini jauh lebih besar dari responden yang menjawab bahwa mereka tidak setuju melakukan adjust terhadap HKUP (24,93%) dan mereka yang tidak tahu hendak melakukan apa (13.04%) terhadap HKUP dimasa gangguan berat saat ini. Secara longitudinal harus ditafsir bahwa HKUP perlu disesuaikan agar dapat diimplementasikan sampai akhir periode pelayanan 2020-2023;
5. Pengubahsuaian (*adjust*) tidak sama dengan penggantian total. Responden sepakat tentang hal itu. Oleh karena itu ketika pada pertanyaan nomor 12 diajukan pertanyaan aspek mana yang perlu diubahsuaikan (*adjust*) menurut aspek-aspek CIPP di dalam HKUP maka responden berpendapat bahwa:
 - Sebesar 34.48% responden setuju mengubah konteks. Jika konteks adalah variabel yang menunjukkan lokalitas lingkup pelayanan, maka hal ini dapat ditafsir juga sebagai adanya kebutuhan agar tiap lokal dapat mendesain program yang lebih dekat dengan kebutuhan lokal mereka. Untuk itu, diperlukan kerja keras dan kreatif dengan dipandu oleh Majelis Sinode lingkup yang lebih kecil dapat mendesain program yang sesuai dengan tantangan dan kondisi lokal mereka tetapi tetap di dalam payung HKUP. Majelis Sinode perlu memberi arahan kepada lingkup

lainnya bahwa HKUP dapat dikerjakan dengan cara yang lebih sederhana sesuai kebutuhan lokal;

- Sebesar 24.02% responden mengusulkan *adjust* pada aspek input. Jelas hal ini merujuk kepada kontraks alokasi sumber daya, termasuk sumber daya pembiayaan pelayanan, yang dialami masing-masing lingkup;
- Sebesar 25.67% responden mengusulkan *adjust* pada aspek prosedur. Karena dalam pertanyaan secara eksplisit dikaitkan dengan koordinasi antar lingkup, maka unsur koordinasi ini adalah prioritas yang perlu ditangani);
- Sebesar 15.84% responden mengusulkan *adjust* pada produk. Mengingat persentasi ini paling kecil, maka dapat ditafsirkan bahwa mayoritas responden (84.16%) menginginkan produk yang bersifat *overcome* dipertahankan dalam sisa periode pelayanan Sinode 2020-2023. Data dan informasi ini melegakan karena entitas GMIT di semua lingkup sepakat bahwa tema penguatan I pada periode pelayanan 2020-2023 tetap dipertahankan namun penyesuaian diperlukan baik pada input maupun proses yang disesuaikan dengan konteks lokalitas pelayanan masing-masing lingkup pelayanan.

KESIMPULAN

Bertolak dari realitas dua bencana yang telah digambarkan di atas, yakni pandemi Covid-19 yang persisten & bencana Badai Siklon Seroja yang dalam penanganan masa rekonstruksi dan rehabilitasinya dipastikan akan memakan waktu yang lama, maka patut diduga bahwa pelaksanaan HKUP 2020-2023 tidak dapat berjalan secara maksimal pada semua variabel HKUP GMIT 2019-2023 yang meliputi konteks, input, proses dan produk (KIPP). Dengan demikian, pelaksanaan kegiatan monev HKUP GMIT dan turunannya harus mempertimbangkan secara serius dampak dari dua bencana tersebut ke dalam implementasi HKUP GMIT di seluruh lingkup GMIT. Guna menjawab permasalahan ini, Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Sinode (BPPPPS) melalui Tim Kerja Perencanaan menyelenggarakan Survei Cepat (*rapid survey*) dengan tujuan mendapatkan respon dari badan pelayanan di tiga lingkup (Jemaat, Klasis dan Sinode) guna memantau, mendeteksi dan mengevaluasi berbagai faktor yang menungkin menjadi kendala bagi implementasi HKUP periode 2020-2023, kemungkinan gangguan yang ditimbulkan oleh bencana berskala masif tersebut. Asumsi sidik cepat ini adalah jika variabel input dan proses terkendala oleh gangguan, maka hal ini berpotensi mereduksi produk (*overcome*) pada semua konteks pelayanan. Jika asumsi ini terbukti benar, maka hipotesisnya atau kemungkinan hipotesisnya adalah diperlukan sejumlah pengubahsuaian (*adjust*) terhadap dokumen HKUP dan turunannya.

Haluan Kebijaksanaan Umum Pelayanan (HKUP) Gereja Masehi Injili di Timor (GMIT) Periode 2020-2023, sebagai bentuk penjabaran jangka menengah dari perencanaan jangka panjang GMIT, yaitu Rencana Induk Pelayanan (RIP) 2011 – 2030, telah ditetapkan dan telah diimplementasikan di Sinode GMIT dan menjadi payung bagi bagi pelaksanaan Pokok-Pokok Program Pelayanan di lingkup Jemaat dan Klasis. Implementasi HKUP dimaksud telah dimulai sejak tahun pelayanan 2020.

Namun demikian sejak awal implementasinya, muncul kendala yang amat berat terhadap aspek-aspek yang harus dicapai di dalam HKUP, yaitu input, proses dan produk. Kendala dimaksud hadir dalam bentuk kejadian dua jenis bencana di wilayah pelayanan

Gereja Masehi Injili di Timor (GMIT), yaitu bencana non-alam Covid-19 dan bencana alam Siklon Tropis Seroja. Hasil riset menunjukkan bahwa dua kejadian bencana dimaksud telah berdampak negatif terhadap implementasi HKUP seperti yang dimaksudkan. Covid-19 dan Siklon Seroja berpengaruh terhadap aspek input berupa penurunan pendapatan Jemaat dan juga terhadap aspek proses berupa terkendalanya upaya koordinasi antara lingkup Sinode – Klasis – Jemaat. Dengan terganggunya dua aspek di atas maka tak bisa dielakan bahwa gangguan akhirnya terjadi juga pada aspek produk. Periode HKUP kali ini diarahkan pada pencapaian produk yang bersifat perubahan yang terjadi (*outcome*) setelah memperoleh input sebagai hasil langsung. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa sampai dengan tahun 2021 sebagian besar produk masih mengarah pada *output* semata. Pengaruh dua kejadian bencana yang breskala masif nyata menjadi penyebab.

Dalam situasi demikian mayoritas pemangku kentingan pada lingkup Jemaat – Klasis – Sinode berharap dapat tetap mengimplementasikan HKUP periode 2020-2023 pada sisa periode pelayanan dengan terlebih dahulu melakukan pengubahsuaian (*adjust*) pada aspek sesuai yang direkomendasikan, terutama pada aspek input, proses dan produk yang megarah kepada perubahan (*outcome*).

REFERENSI

- Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Sinode GMIT. 2020. “Kajian Dampak Covid 19 terhadap Kinerja Pelayanan di Liangkup GMIT”. Majelis Sinode GMIT, Kupang, Oktober 2020.
- Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Sinode GMIT. 2020. “Kajian Dampak Bencana Siklon Tropis Seroja Terhadap Infrastruktur di Lingkup GMIT”. Majenlsi Sinode GMIT, Kupang, Mei, 2020.
- Badan Pusat Statitik Propinsi NTT. “Ekonomi NTT Triwulan IV-2020 Mengalami Kontraksi Sebesar 2,27 Persen”. Diakes pada Juni 24, 2020.<https://ntt.bps.go.id/pressrelease/2021/02/05/1014/>
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. “Surat Edaran Dirjen P2P Nomor: HK.02.02/II/753/2020 Tentang Revisi ke-3 Pedoman Kesiapsiagaan Menghadapi Infeksi Novel Corona Virus (COVID-19)”. Diakes pada Juni 24, 2020.<https://kemkes.go.id/article/view>
- Majenis Sinode GMIT. 2019. Haluan KebijaksanaanUmum Pelayanan Sinode GMIT Periode 2020 – 2023. GMIT, Kupang.
- Prasetyo, S, W. Kurniawan, I.R. Rumahorbo. 2021. Synoptic and Mesoscale Analysis of Extreme Rainfall Event In Cilacap Meteorological Station, Indonesia On December 7, 2018 Jurnal Ilmu dan Inovasi Fisika) Vol. 05, No. 02 (2021) 121 – 131. Departemen Fisika FMIPA Universitas Padjadjaran
- Sugiyarto. 2015. Dasar-Dasar Statisitik Farmasi. Binafsi Publisher, Jogjajarta.